PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Salamiah dan Muthia Septarina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

ABSTRAK

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia dan aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, agama adalah factor penting dalam tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika pengendalian diri tidak dapat terkontrol lagi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kasus-kasus kekerasan rumah tangga banyak terjadi ditengah-tengah kita semua, korban yang berjatuh pun dari berbagai lapisan masyarakat, seperti artis, pejabat negara, kalangan bawah, bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KDRT ini bisa menimpa istri, anak, ataupun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk juga pembantu rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, untuk mencegah dan melindungi korban dari tindakan pelaku kekerasan rumah tangga negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUDNRI 1945. Dan diperlukan juga suatu perangkat hukum yang lebih terkomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada tanggal 14 september 2004.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia dan aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian pada

setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, agama adalah factor penting dalam tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika pengendalian diri tidak dapat terkontrol lagi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kasus-kasus kekerasan rumahtangga banyak terjadi ditengah-tengah kita semua, korban yang berjatuhan pun dari berbagai lapisan masyarakat, seperti artis, pejabat negara, kalangan bawah, bahkan kalangan orang yang berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KDRT ini bisa menimpa istri, anak, ataupun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk juga pembantu rumah tangga.

Menurut penelitian Departemen Kehakiman Amerika, dua pertigadari serangan fisik terhadap wanita dilakukan oleh orang yang dikenal baik. Di Amerika sendiri salahsatu tempat yang paling berbahaya bagi wanita adalah rumahnya sendiri, sekitar 1500 orang wanita tewas dianiaya suami atau pacar mereka, sedangkan menurut catatan FBI, sekitar 2 juta pria menganiaya pasangannya setiap tahunnya. (Kompas.com diakses tgl 11 mrt 2009).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, untuk mencegah dan melindungi korban dari tindakan pelaku keketasan rumah tangga negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan diperlukan juga suatu perangkat hukum yang lebih teromodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan pada tanggal 14 september 2004. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga diharapkan untuk dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 3, yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondeskriminasi, dan perlindungan korban. Karena

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan,martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan mendapat perlindungan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau dari UU No 23 tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga ?

Tujuan dan target luaran

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai :

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU No 23 tahun 2004
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga.

Manfaat Penelitian sebagai target luaran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti ,baik secara teoritis maupun praktis .Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pemahaman terhadap masalah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.khususnya di Indonesia. Sedang secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuat Undang-Undang dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara maksimal, Dengan diwujudkan dalam bentuk jurnal .

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normative, maka dalam penyusunan pembahasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah
Cara yang dipergunakan dalam pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis dengan memperhatikan aspek social dalam masyarakat.
2. Sumber data

Data yang diambil dan dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah : Undang-Undang No 23 Th 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang No 39 Th 1999 tentang Hak asasi manusia, Pendapat para ahli hukum, buku, Koran, serta peristiwa yang terjadi dimasyarakat yang terkait dengan KDRT.

3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan melakukan study kepustakaan dan memperhatikan peristiwa yang terjadi dimasyarakat kemudian diolah dengan jalan menganalisa dan diuraikan dalam pembahasan.

4. Analisa Data

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisa menyangkut aspek hukumnya kemudian disusun, diuraikan serta dijelaskan secara terperinci sehingga hasil analisa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau UU KDRT

Ketika komisi nasional (KOMNAS) perempuan mengumumkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tanggal 25 Nopember- 10 Desember 2003 lalu , menjadi bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari tindak kekerasan. Banyak lembaga perempuan yang menyuarakan anti kekerasan ini, tapi hasilnya belum begitu maksimal, sebab sampai hari ini kekerasan masih saja dialami oleh perempuan. Terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang masih mengagungkan kaum laki laki dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, serta istri harus nurut dan manut pada suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan ini.

Banyak factor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut, sekalipun UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun penerapannya ditengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal, sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan yang sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada

kemampuan suami sebagai pencari nafkah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi UU KDRT perlu kesinambungan yang melibatkan kaum pria serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja. Perlu ketegasan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini hukuman itu tampaknya belum berjalan sempurna, perihal bukti-bukti autentik yang dibutuhkan pihak berwenang seringkali mematahkan kembali kekerasan itu . Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari perilaku kekerasan itu, sekalipun Undang-undang soal kekerasan itu sudah ada tetapi kenyataannya sampai saat ini kekerasan masih terjadi. Perlu ada lembaga yang menangani intensif pengaduan korban, paling tidak lembaga yang menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan perlindungan . Kalaupun ada yang disebut “rumah aman “, apakah bisa menampung banyak korban ,mungkin perlu dipikirkan bersama, agar lembaga itu online. Korban yang mengadu sekalipun lewat telpon langsung ditanggapi dan diteruskan pada yang berwenang . Atau petugas memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, jika kasus kekerasan itu dalam rumah tangga harus ada sebuah lembaga yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Lembaga ini menangani pasangan pranikah .Dilembaga ini pasangan yang akan berumah tangga perlu diberikan bimbingan tentang kesiapan berumah tangga, hal ini sangat perlu untuk melihat apakah pasangan ini memiliki pengetahuan yang kelak menjadi benteng bagi mereka untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.Kekerasan itu bukan hanya dilakukan para suami, istri juga punya potensi melakukan tindakan kekerasan, misalkan memaksakan pemenuhan materi yang tidak sebanding dengan kemampuan suami. Dengan adanya lembaga ini secara otomatis memberikan kewenangan penuh bagi calon suami istri untuk bisa mendapat ijin menikah dari lembaga perkawinan . Siapa yang menangani lembaga ini ? bisa saja dari departemen agama, organisasi perempuan atau LSM yang bertujuan menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain usia yang matang, kesehatan dan bekal pengetahuan yang cukup akan menekan tingkat kekerasan karena kedua belah pihak sudah tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang bertentangan dengan hukum. Banyak sekali korban kekerasan itu muncul akibat persoalan ekonomi yang masih bergantung pada kemampuan pasangan. Hal ini berakibat kekuatiran diri untuk membela diri pada saat masalah timbul dalam rumah tangga, hingga akhirnya menerima

saja diperlakukan kasar oleh pasangan, karena takut tidak bisa menafkahi diri jika pasangan tidak memberikan uang . Melihat kenyataan ini, perlu memberdayakan diri terutama masalah kemampuan berwira usaha, seandainya tidak memungkinkan untuk bekerja dilembaga tertentu, memang banyak sudah melakukan pembinaan bagi perempuan untuk bisa melakukan pekerjaan sampingan. Hal ini sebagai upaya untuk mampu mandiri dan memperoleh penghasilan. Seandainya ekonomi mulai mapan, bukan berarti kasar pada suami dan bertindak sewenang-wenang, hal ini akan berdampak lebih buruk lagi, oleh karena itu dalam perjalanan berumah tangga diperlukan kearifan dan saling pengertian hingga terhindar dari kekerasan.

Naskah awal piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang berga bung dalam organisasi tersebut. Namun sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan semacam itu. Lantaran mencemaskan prospek kedaultan mereka, banyak negara bersedia untuk “mengembangkan hak asasi manusia namun tidak bersedia “melindungi”hak itu akhirnya diputuskan untuk memasukan sedikit saja acuan tentang hak asasi manusia didalam piagam PBB (UN Charter), disamping menugaskan komisi hak asasi manusia (Commission on Human Right) komisi yang dibentuk oleh PBB berdasarkan sebuah ketetapan didalam piagam tersebut untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia . Piagam ini sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar , akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatangannya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama dan terpisahdalam kerjasama dengan organisasi ini untuk memperjuangkan penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan kebebasan mendasar untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan ras,jenis kelamin,bahasa atau agama. Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh majilis umum pada tanggal 10 Desember 1948 . Pernyataan ini, yaitu deklarasi universal hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Right), diumumkan sebagai suatu standarpencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara , Hak hak yang disuarakannya disebarakan lewat pengajaran dan pendidikan serta lewat langkah-

langkah progresif, secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya .

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan rumah tangga.

Ada beberapa sebab terjadinya kekerasan adalah :

1. Psychodynamic model, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya mothering / jejak ibu, seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri .
2. Personality or character trait model, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi, berkarakter buruk.
3. Social learning model, kurangnya kemampuan social yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak , menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
4. Family structure model, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan .
5. Enviromental stress model adalah yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan tekanan sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan factor-faktor yang membentuk lingkungan manusia seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
6. Social Psychological model, dalam hal ini frustrasi dan stress menjadi factor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak .Stress bisa terjadi karena berbagai sebab seperti konflik rumah tangga, isolasi secara social.
7. Mental illness model kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan (I. Marsana Windhu,1999).

Siapa saja yang punya kewajiban dalam pencegahan terhadap tindak kekerasan adalah :

1. Kewajiban Pemerintah ,

a. Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan merumuskan :

- merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .
- menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi.
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitive gender (vide pasal 11 dan pasal 12 UUPKDRT).

b. Upaya penyelenggaraan pelayanan adalah :

- penyediaan ruang layanan khusus dikantor kepolisian
- penyediaan aparat , tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani
- pembuatan dan pengembangan system mekanisme program pelayanan kerja sama.
- memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (vide pasal 13 UUPKDRT).

2. Kewajiban Masyarakat,

Kewajiban masyarakat adalah menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerjasama dengan masyarakat atau lembaga social lainnya (vide pasal 14) . Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (vide pasal 15).

3. Peran Kepolisian,

Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan

- a. Sejak diketahui atau diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu 1x24 jam wajib memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak diterima atau ditangani
- c. Dalam waktu 1x24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib minta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan . kepolisian

dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (vide pasal 17). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (vide pasal 20).

4. Peran tenaga kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya dan membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan korban dan visum et repertum. Tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (vide pasal 21) . Tenaga kesehatan memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban (vide pasal 40).

5. Peran pekerja social

Dalam memberikan pelayanan pekerja social harus :

- a. Melakukan konseling
- b. Memberikan informasi tentang hak-hak korban
- c. Mengantar korban kerumah aman atau tempat tinggal alternative
- d. Melakukan koordinasi terpadudengan kepolisian, dinas social, lembaga social yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja social dilakukan dirumah aman milik pemerintah, pemda, atau masyarakat (vide pasal 22)

5. Peran Relawan pendamping

Memberikan pelayanan , relawan pendamping dapat :

- a. Menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendamping
- b. Mendampingi dengan membimbing korban
- c. Mendengar keluhan korban secara empati
- d. Memberikan pengarahan secara psikologis dan fisik kepada korban (vide pasal 21).

6. Peran Pembimbing rohani

Dalam memberikan pelayanan , pembimbing rohani harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (vide pasal 24).

7. Peran Advokad

Dalam memberikan pelayanan, advokad wajib

- a. Memberikan konsultasi hukum
- b. Mendampingi korban dalam proses hukum
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan ;pendamping, dan pekerja social (vide pasal 25).

Untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian ditempat korban atau ditempat kejadian. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (vide pasal 26). Dalam hal korban adalah seorang anak laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, untuk anak yang bersangkutan (vide pasal 27).

Hak hak korban adalah perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lain baik sementara atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pelayanan khusus terkait kerahasiaan korban (vide pasal 10).

Terhadap korban dilakukan pemulihan, untuk kepentingan pemulihan korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (vide pasal 39).

Ada beberapa ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Ancaman pidana atas kekerasan fisik dan psikis, perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana 5-15 tahun atau denda 15-45 juta. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami kpd istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 5 juta, (ini merupakan delik aduan). Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 9 juta . Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana 4 bulan denda 3 juta (vide pasal 45 jo pasal 52).

Ancaman pidana atas kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana penjara paling lama 12 tahun

atau denda 36 juta (vide pasal 46) . Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 12 juta sampai 300 juta (vide pasal 47)

Ancaman pidana atas penelantaran rumah tangga dipidana maksimal 3 tahun atau denda 15 juta, setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut (vide pasal 50).

Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk cultural, sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku mempresentasikan budaya atau nilai yang eksis di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Ketika komisi nasional (KOMNAS) perempuan mengumumkan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tanggal 25 Nopember- 10 Desember 2003 lalu, menjadi bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari tindak kekerasan. Banyak lembaga perempuan yang menyuarakan anti kekerasan ini, tapi hasilnya belum begitu maksimal, sebab sampai hari ini kekerasan masih saja dialami oleh perempuan. Terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang masih mengagungkan kaum laki laki dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, serta istri harus nurut dan manut pada suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan ini.
Banyak factor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut, sekalipun UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun penerapannya ditengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal, sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan yang sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah.
2. Untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melapor secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian ditempat korban atau

ditempat kejadian. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (vide pasal 26). Dalam hal korban adalah seorang anak laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, untuk anak yang bersangkutan (vide pasal 27).

Hak hak korban adalah perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lain baik sementara atau berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pelayanan khusus terkait kerahasiaan korban (vide pasal 10).

Terhadap korban dilakukan pemulihan, untuk kepentingan pemulihan korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (vide pasal 39).

Saran –saran :

1. Kami sebagai penulis menghendaki agar Undang-Undang PKDRT itu disosialisasikan dengan semaksimal mungkin jadi masyarakat dapat memahami apa arti sebenarnya Undang-Undang PKDRT tersebut.
2. Korban, diharapkan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga sesegeranya melapor ke pihak berwajib

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Yesmin dan Adang, kriminologi, Bandung, refika aditama 2010

Hasta la vista 22 januari 2013.

I. Marsono Windhu, kekerasan terhadap anak dalam wacana dan realitas, pusat kajian dan perlindungan anak, 1999.

Kompas.com akses tanggal 11 maret 2009.,

Majdin gultom, Prof, Dr, Sh, Mh, Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, PT Refika aditama, 2014.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Undang-Undang No 39 Tahun 1999